

**DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Lombujaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna
Barat)**

Oleh: Siti Ramayana¹, Bakri Yusuf²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Siti Ramayana (C1B1 18 127) Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Lombujaya, di bimbing oleh Drs. Syaifudin S. Kasim, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bakri Yusuf, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing II.

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang cukup besar, karena pembangunan ini di fokuskan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan teori kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang di gunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat, secara umum sudah cukup baik di karenakan kegiatan yang di laksanakan dalam tahap-tahap pembangunan program desa sudah sesuai dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pemerintah Desa Lombujaya

**DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Lombujaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna
Barat)**

By: Siti Ramayana¹, Bakri Yusuf²

*^{1,2} Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University, Kendari,
Indonesia*

ABSTRACT

Siti Ramayana (C1B118127) The Impact of Implementing the Village Economic Development Program in Alleviating Poverty in Lombujaya Village Communities, supervised by Drs. Syaifudin S. Kasim, M.Si. as Supervisor I and Bakri Yusuf, S. Sos., M.Si. as Supervisor II.

Implementation of Village Development is one of the obligations of the village government that must be carried out and is an area that requires substantial funding, because this development is focused on the community. The purpose of this study was to find out how big the Impact of the Implementation of the Village Economic Development Program in Poverty Alleviation by using qualitative theory, the informants in this study were nine people. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Impact of Implementing the Village Economic Development Program in Alleviating Community Poverty, in general, is quite good because the activities carried out in the village program development stages are appropriate and the benefits are felt for the local community.

Keywords: *Lombujaya Village Government*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi. Daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan. Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa (UU No 23 Tahun 2014). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manan, 2012). Pemerintah memiliki berbagai program yang terintegrasi antara lain program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang di jalankan, (Aghnia, 2018). Pembangunan Ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan utama untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya dan berupaya mengurangi tingkat kemiskinan serta menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Karena dengan kesempatan kerja, masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2006).

Desa Lombujaya merupakan desa berkembang di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara , dengan tingkat ekonominya masih terbilang rendah yang sebagian besar mata pencaharianya di bidang pertanian dan peternakan. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, seperti bibit unggul untuk pertanian, dan Budidaya ayam kampung untuk peternakan, sejak tahun 2020 hingga sekarang masih berjalan.

Desa Lombujaya memiliki penduduk sebanyak 506 jiwa yang terdiri dari 262 jiwa penduduk laki-laki dan 244 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 123 jiwa. Sedangkan penduduk yang tergolong masyarakat miskin sebanyak 70 jiwa penduduk. Sejak tahun 2020 Dengan adanya program bantuan dari pemerintah, Seperti petani yang diberikan bantuan bibit unggul untuk olah yang kemudian hasilnya dijual. Sedangkan peternak difasilitasi dengan program bantuan budidaya ayam kampung.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna. Untuk mendapatkan informan sehubungan dengan penelitian ini, maka penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa berjumlah 9 orang. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verivication*), (Usman dan Akbar 2009)).

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Desa dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Lombujaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Desa yakni Modal, Hewan Ternak Pembagian Bibit yang tergambar sebagai berikut :

1. Pembagian Modal

Modal merupakan pelaksanaan yang paling menentukan dalam perkembangan kegiatan atau usaha petani di Desa Lombujaya. Masyarakat petani pada umumnya masih menggunakan peralatan sederhana dan sangat tradisional dalam menjalankan pertanian. Jika mereka tidak ada modal maka mereka tidak akan menjalankan dan melajukan perekonomiannya dengan lahan yang sering di gunakan, sehingga pemberian modal dari pemerintah agar dapat membuka lahan baru dan mendapatkan hasil yang baik karena jika menggunakan lahan yang sering di gunaka tidak dapat melakukan hasil produksi yang baik darisegi, jumlah dan kualitasnya.

2. Pembagian Hewan Ternak

Peternakan merupakan perwujudan dari konsep partisipatoris. Keberadaan program tersebut stimulasi dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Sama halnya dengan masyarakat Desa Lombujaya Peternakan ayam kampung pada umumnya yang mempunyai masing-masing peternakan adalah ibu rumah tangga dan bapak yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bawah tingkat SMA, hewan diadakan oleh pemerintah desa

melalui program desa yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Ayam kampung sudah lama dikenal dan akrab dengan lidah masyarakat, telur dan dagingnya sudah lama digemari oleh orang-orang populasinya pun cukup banyak dan menyebar secara merata. Peternakan yang ada di Desa Lombujaya dilakukannya secara perorangan jadi tidak ada yang namanya sistem pembagian hasil, murni hasinya milik sendiri itu juga sangat meningkatkan pendapatan dengan populasi yang cepat 15-20 hari.

3. Pembagian Bibit

Dari sektor pertanian, pemerintah desa mengeluarkan bibit untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Lombujaya. Tujuan dari pembagian bibit tersebut, untuk meningkatkan pangan para warga serta memanfaatkan lahan yang ada. Bibit tanaman yang di berikan berupa gambas, cabai, dan jagung kuning. Pemerintah desa membagikan alasan mengenai ketiga bibit tersebut karena sudah menjadi kebutuhan pokok.

Dampak Setelah Dilakukannya Program Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Lombujaya, Kec. Sawerigadi, Kab. Muna Barat.

1. Kenaikan Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah imbalan yang diterima sebagai akibat dari penyerahan produksi yaitu tenaga kerja, modal dan entrepreneur. Sedangkan jumlah pendapatan adalah ukuran keluarga dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang memadai untuk membandingkan laju perkembangan keluarga.

2. Tidak Tepat Sasaran

Hal ini terjadi karena penanggulangan krmiskinan tetapi masih banyak juga program desa yang belum tepat sasaran, permasalahan ini terjadi di Desa Lombujaya, sementara itu masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa pemerintah yang harus mengurus segala kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pembangunan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, dengan judul Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Desa, di desa lombu jaya kecamatan sawerigadi kabu paten muna barat, dapat disimpulkan, yakni Pelaksanaan Pelaksanaan program Pembangunan Ekonomi Desa Lombu Jaya sepenuhnya terlaksana dengan baik hal ini dapat

dilihat pelaksanaannya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan Ekonomi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Pelaksanaan dan dampak. Pelaksanaannya yang di lakukan adalah Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap Pemerintah Desa, dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Sedangkan Dampaknya yaitu Sumber daya manusia, dan keberhasilan bagi masyarakat dan kepusan bagi pemerintah.

5.1. Saran

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang peranan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Lombu Jaya Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat. Adapun saran tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa
Kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan.
2. Kepada masyarakat
Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan/partisipasi kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Desa serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata-mata untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul *Manan*. (2012). Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan. Agama. Jakarta: Kencana.
- Ade kristian P. 2020. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syah Bandar Kabupaten Serdang. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Adisasmita dan Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif Jogjakarta, Graha ilmu.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2017. Sosiologi Perdesaan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ani Sri Rahayu. 2018. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Muna Barat. Penyelenggaraan Terkait Dengan Pencapaian Perencanaan, Evaluasi Dan Kegiatan Pembangunan.
- Boudreau, C., Elmendorf, C. S., & MacKenzie, S. A. (2015). Informing electorates via election law: An experimental study of partisan endorsements and nonpartisan voter guides in local elections. *Election Law Journal*, 14(1), 2-23.

- Boudreau, C., Elmondorf, dan Maekanzie, S.A. 2015 lost in space? Information Shortcuts, Spatial Voting, And Local Government Representation. Political Research Quarterly.
- Firman. 2020. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 1 (Mei 2020) 39-52
- G. R. Terry. 2012. Asas-Asas Management. Bandung. PT Alumi.
- H. Abdul Manan. 2014. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hafelin Frinces 2008. Manajemen Konsep Membangun Sukses; Yogyakarta. Mida Pustaka.
- Handoko Hani T. 2011. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Iman Ode S. 2020. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawobende Kecamatan Andolo Barat. Universitas Halu Oleo.
- Jamaludin, 2015, Sosiologi Pendesaan, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Juliana. E. 2017. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dinagori Marjadi Pisang (Studi Kasus Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Nagori Marjandi Pisang Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun). Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mahyudi, Ahmad. (2004). Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data. Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mhulis. 2021. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintah di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2020. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Muhammad Labolo. 2008. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasrul Haq. 2019. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nawaai 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah University Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Partini H. 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2016. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- PMK. No. 50/PMK. 07/2017. Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pasal 143 ayat (1).

- Rahayu, Ani Sri (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Randhi Dian P. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Di Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Universitas Islam Negeri Alauddin Makkassar.
- Randi, D.P. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.
- Saputra, I.O. (2020). “Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa”. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*. 14(1): 100-114
- Subandi. (2012). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Unit Penerbit Alfabeta.
- Tri Angraini J. 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Emokolo Kabupaten Bombana. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Publikasi Scholar.
- Widiastutiningrum. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Universitas Negeri Semarang.